

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI SINERGI KEBIJAKAN  
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA**

***IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THROUGH POLICY  
SYNERGY BETWEEN THE PROVINCE, DISTRICT, AND CITY  
GOVERNMENTS***

**Ridwan Saifuddin**  
**Balitbangda Provinsi Lampung**  
E-mail: bumikitasatu@gmail.com

Dikirim 17 Oktober 2019; Direvisi 10 November 2019; Disetujui 27 November 2019

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian ini pembangunan sektor pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan wadah (lembaga) untuk koordinasi, integrasi, dan akselerasi peningkatan serta pemerataan mutu pendidikan di Provinsi Lampung, yang merepresentasikan otoritas pengambil kebijakan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Peningkatan kompetensi guru perlu menjadi perhatian (prioritas) utama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya peningkatan serta pemerataan kualitas pendidikan dasar dan menengah, termasuk kemampuan dan penguasaan *soft skill*. Infrastruktur penunjang juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor pendidikan. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga perlu mengembangkan model pembelajaran khusus, yang ditujukan bagi peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

**Kata kunci:** sinergi, pembangunan, kompetensi, pendidikan, infrastruktur.

**Abstract:** *This study aims to identify forms of synergy between provincial, districts, and city governments in the management of primary and secondary education by involving cross-stakeholders. This study uses a qualitative method. The conclusion of this research is the development of the education sector cannot be done partially. Institutions are needed for coordination, integration, and acceleration of the increase and even distribution of quality of education in Lampung Province, which represents provincial, districts, and city level policy makers. Increasing teacher competency needs to be a priority of the provincial, districts, and city governments in efforts to improve and evenly distribute the quality of primary and secondary education, including the ability and mastery of soft skills. Supporting infrastructure also determines the success of the development of the education sector. Provincial, districts, and city governments also need to develop special learning models, aimed at students with special intelligence and talent potential.*

**Keywords:** *synergy, development, competence, education, infrastructure.*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang

hayat. Karena itu, pengelolaan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi harus sinergi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan: berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Mutu pendidikan juga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pemerintah provinsi wajib mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada pemerintah kabupaten atau kota, juga penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan. Bagaimana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diwujudkan secara sinergis.

Pembagian kewenangan pengelolaan berdasarkan jenjang pendidikan bukan dimaknai sebagai “pemisahan” pengelolaan antarjenjang pendidikan tersebut. Sinergi kebijakan bidang pendidikan dibutuhkan agar sistem pendidikan nasional efektif. Misalnya, bagaimana pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, serta penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Atau, bagaimana pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan (potensi) lokal.

Kondisi pendidikan di Lampung kalau dibandingkan dengan provinsi lain, terutama di Pulau Jawa, masih jauh tertinggal. Perlu dirumuskan bagaimana mendongkrak mutu pendidikan di Provinsi Lampung ini yang masih jauh dari harapan. Meski untuk melampaui pendidikan di Pulau Jawa dirasa sulit, paling tidak bisa mendekati kualitas yang ada di sana. Disparitas sekolah di 15 kabupaten/kota masih mencolok. Disparitas itu yang menyebabkan IPM Lampung secara kumulatif (kabupaten dan kota) menjadi rendah. Dari data yang ada, hanya beberapa kabupaten/kota yang pendidikannya bagus. Sebagian besar

lainnya masih membutuhkan upaya lebih serius untuk bisa mengatasi keteringgalannya.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sudah memetakan kondisi sekolah terkait pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dari proses tersebut diperoleh data, ternyata, rata-rata sekolah di Lampung ini—bahkan nyaris semua sekolah—belum ada yang mencapai 8 SNP. Rata-rata capaian masih pada standar 4 menuju standar 3. Artinya, masih jauh untuk memenuhi 8 SNP. Data tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam tata kelola pendidikan di daerah ini. Di antara masalah tersebut adalah belum terbangunnya sinergi kebijakan di antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Peran *stakeholders* juga perlu ditingkatkan dalam memperbaiki mutu setiap satuan pendidikan.

## RUMUSAN MASALAH

Pertanyaan yang akan dijawab melalui kajian ini adalah apa saja bentuk integrasi dan sinergi dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah yang dapat dilakukan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Lampung secara bersama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah?

## TUJUAN DAN SASARAN

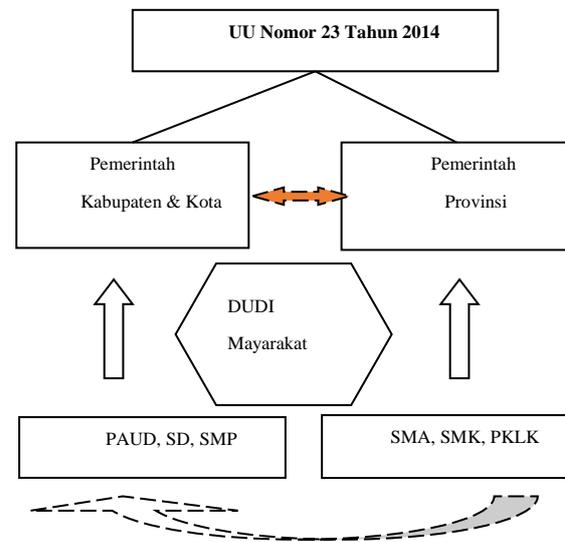
Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi bentuk sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan, yang perlu menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi untuk mencapai tujuan pengelolaan pendidikan menengah di Provinsi Lampung yang lebih baik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam prosesnya, penelitian ini melibatkan pengambil kebijakan bidang pendidikan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan lain seperti dunia usaha dan dunia industri (DUDI) juga masyarakat. Selain melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, pengumpulan data dari para pemangku kepentingan juga dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD). Pendekatan kualitatif eksploratif dalam kegiatan ini dilakukan dalam rangka merumuskan kerja sama bidang apa saja yang dapat dibangun oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Lampung melalui penyelenggaraan pendidikan formal di satuan pendidikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## TAHAPAN PENELITIAN

Tahapan penelitian ini, dimulai dari formulasi permasalahan dan identifikasi isu strategis melalui tahap curah pendapat (*brainstorming*) yang melibatkan unsur-unsur terkait pendidikan di Provinsi Lampung. Selanjutnya penyusunan konsep awal bidang kerja sama pengelolaan pendidikan dasar dan menengah dengan pendekatan empiris. Validasi dan triangulasi dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus melibatkan stakeholders pendidikan di Provinsi Lampung. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan kerangka sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Kegiatan

## LANDASAN TEORI

### 1. Persaingan Industri 4.0

Apakah Indonesia siap menghadapi tantangan Industri 4.0 dan persaingan global? Studi *Smeru Research Institute*—sebuah lembaga riset yang berfokus pada bidang penelitian sosial dan ekonomi di Indonesia—tentang keterampilan tenaga kerja Indonesia (2019), menyimpulkan masih rendahnya sumber daya manusia Indonesia, khususnya keterampilan tenaga kerja kita. Studi yang dilakukan pada 2018 ini menyimpulkan, antara lain, keterampilan rata-rata pekerja Indonesia sangat rendah dan Indonesia sangat sedikit memiliki individu yang sangat terampil.

Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah kondisi pada abad ke-21, di mana terjadi perubahan besar pada berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi. Revolusi ini ditandai dengan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya kecerdasan

buatan, robot, *blockchain*, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, *Internet of Things*, percetakan 3D, juga kendaraan tanpa awak (*Wikipedia*). Maka, perlu penyiapan dan kesiapan sumber daya manusia dalam merespon kemajuan teknologi tersebut, sehingga tidak membuat kita semakin tertinggal.

Data *Global Human Capital Index* pada 2017 menunjukkan, Indonesia menempati ranking 65 dari 130 negara berdasarkan empat pilar SDM: (1) Kapasitas berdasarkan tingkat pendidikan tenaga kerja; (2) Penyebaran (partisipasi tenaga kerja); (3) Pengembangan, peningkatan keterampilan pekerja dan pendidikan angkatan kerja muda; dan (4) Ketersediaan pekerja terampil. Penyiapan SDM yang terampil dan relevan dengan kebutuhan Industri 4.0 berarti mempersiapkan tenaga kerja sejak bangku sekolah dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk memanfaatkan serta mengembangkan teknologi terkini. Mendorong angkatan kerja untuk berinovasi dalam pemanfaatan teknologi mutakhir dan menginternalisasikan teknologi dalam pekerjaannya. Tanpa kesiapan berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sesuai, maka tenaga kerja kita akan semakin tersingkir seiring dengan lahirnya mesin-mesin pintar yang mampu menggantikan tenaga kerja manusia dalam beberapa jenis pekerjaan.

Sebagaimana rekomendasi dari hasil penelitian “Smeru” untuk masa depan pekerja Indonesia, yaitu semakin mendesaknya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Kebijakan pendidikan dasar dan menengah kini menjadi bagian dari otonomi daerah. Maka, tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih efektif menangani kebijakan pendidikan ini. Indonesia juga membutuhkan lebih banyak individu yang berbakat dan sangat terampil, yang sampai

saat ini masih sulit ditemukan. Individu berbakat dan sangat terampil ini perlu didukung untuk dapat membangun kapasitas mereka secara optimal, yang berbeda dengan konsep pendidikan keterampilan rata-rata. Menurut kajian “Smeru,” saat ini jumlah individu berketerampilan sangat tinggi hanya sekitar 15.700 dari 3,1 juta siswa berusia 15 tahun. Di samping itu, perlunya kebijakan dalam rangka meningkatkan sektor kesehatan dalam jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan kecerdasan anak, kesehatan individu harus dijaga dengan baik sejak tahap pranatal. Perlu asupan gizi dan kesehatan bagi ibu yang mengandung. Juga, perlu mengangkat kemampuan kognitif rata-rata masyarakat Indonesia, untuk bisa berkiprah pada tingkat global, yaitu dengan menghasilkan individu-individu berbakat dengan keterampilan yang tinggi di atas rata-rata.

Sementara ini, data menunjukkan, lembaga pendidikan vokasional yang diharapkan mencetak lulusan berketerampilan, justru paling tinggi kontribusinya melahirkan pengangguran usia produktif. Kontribusi lulusan SMK terhadap tingkat pengangguran terbuka, tercatat tertinggi sejak 2017-2019. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara keterampilan yang diberikan kepada siswa SMK selama menempuh jenjang pendidikan di sekolah, dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja dan industri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, respon terhadap disrupsi yang terjadi pada era-Revolusi Industri 4.0 ini perlu disikapi secara bersama baik oleh pemerintah (kebijakan), dunia usaha dan industri, para pendidik dan penyelenggara pendidikan, serta masyarakat. Mengatasi kekurangan tenaga kerja potensial dan terampil harus dilakukan bersama. Sekolah tidak cukup

hanya memberi bekal ilmu pengetahuan kepada siswanya, tetapi juga *soft skill* dan ketangkasan untuk terus belajar. Sekolah perlu mengembangkan sistem dan kurikulum yang lebih gesit (*agile*) untuk merangsang tumbuhnya daya kreasi, inovasi, serta daya kritis siswa. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya pengelola pendidikan beserta pemangku kepentingan lainnya.

### Tantangan Pendidikan

Disrupsi pada era Industri 4.0 dengan kemajuan teknologi yang mampu menggantikan tenaga kerja manusia pada beberapa sektor pekerjaan, menuntut penyikapan dan kebijakan yang tepat. Tingkat literasi dan kebutuhan akses informasi semakin tinggi dibanding sebelumnya, baik untuk masyarakat di perkotaan hingga di pelosok daerah. Ketersediaan infrastruktur teknologi dan pemerataan akses informasi menjadi prasyarat penting menghadapi tantangan era digital. Konsekuensinya, pemanfaatan teknologi memungkinkan akses terhadap ilmu pengetahuan akan semakin masif dan cepat. Pada saat yang sama, perubahan perilaku peserta didik akan terjadi sebagai jawaban atas lingkungan yang berubah. Generasi yang lahir pada era teknologi (Generasi Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha) membawa perilaku yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Perubahan tersebut harus direspon cepat kalangan penyelenggara pendidikan. Beberapa kampus sudah menggunakan *smartphone* untuk seluruh proses administrasi dan pembelajaran, misalnya. Penggunaan *smartphone* mengurangi penggunaan kertas. Kartu mahasiswa, absensi, sampai nilai hasil ujian mahasiswa tidak lagi tercetak dalam lembaran kertas, melainkan diunggah melalui aplikasi pada *smartphone*. Apakah “perubahan cara” dengan hadirnya teknologi tersebut sudah

cukup? Derasnya arus informasi dan pengetahuan melalui media teknologi membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Tidak relevan lagi pola belajar satu arah atau *top down* dari pendidik kepada siswa/mahasiswa. Guru/dosen tidak penting lagi jika hanya mengajarkan teori-teori di kelas. Peserta didik kian membutuhkan kebebasan untuk mengakses ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan dari banyak sumber yang bisa diaksesnya. Pembatasan informasi tidak lagi dibutuhkan. Pola evaluasi pembelajaran atau ujian juga perlu disesuaikan.

Kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran tidak cukup lagi sebatas *textbook knowledge*. Setidaknya ada lima keterampilan yang dibutuhkan peserta didik pada era digital ini. *Pertama, critical thinking*. Perkerjaan dinamis berganti, kemampuan kritis semakin dibutuhkan. Bagaimana proses pendidikan juga mengajarkan peserta didik untuk berfikir kritis. *Kedua, communication skill*. Misalnya, bagaimana membangun tim kerja; kemampuan *team building*. Mengekspresikan pikirannya secara lisan dan tulisan. Bahasa generasi sekarang berbeda dengan generasi dulu. Keterampilan menuangkan pikiran dalam tulisan semakin dibutuhkan. *Ketiga, collaboration skill*. Bagaimana bisa bekerja antarteman, antarpulau, antarnegara. Sekarang semua bisa kolaborasi dengan internet. *Keempat, creativity*. Jadi yang dibutuhkan adalah perubahan cara belajar. Pembelajaran tidak bisa lagi dogmatis, mengekang kreativitas, hafalan. Perlu lebih memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Menemukan sesuatu, inovasi, dan pencerahan lainnya. *Kelima, problem*

*solving*, bagaimana mampu memecahkan masalah yang dihadapi.

Pertanyaannya, apakah kurikulum yang diterapkan di sekolah sudah memenuhi kebutuhan tersebut? Apakah model pendidikan kita sudah mampu menjawab kebutuhan era Industri 4.0? Nyatanya, saat ini lulusan SMA dari negara kita jika hendak kuliah di luar negeri tidak bisa langsung ikut kuliah. Karena pendidikan SMA di sini tidak *inline* dengan standar global. Namun, celaknya, pendidikan yang kita kembangkan juga tidak bisa menjawab kebutuhan lokal. Contoh, kita tidak punya ahli kebencanaan. Padahal kita hidup di daerah rawan bencana. Masalah pendidikan kita cukup kompleks. Orientasi model pendidikan yang kita terapkan tidak jelas. Standar global tidak tercapai, kebutuhan lokal juga tidak terpenuhi.

Perlu dibangun model pendidikan baru yang lebih kompatibel dengan tuntutan zaman. Cara belajar harus berubah. Belajar adalah perilaku yang dapat dipelajari. Ini cara menjadi lebih baik. Banyak orang secara keliru percaya bahwa kemampuan belajar adalah masalah kecerdasan (IQ). Bagi mereka, belajar adalah sifat abadi dari faktor genetika. Itulah sebabnya banyak orang tidak terlalu memikirkan bagaimana mengembangkan suatu bidang penguasaan. Strategi pembelajaran dapat dibangun dan dikembangkan sesuai tantangan lingkungan.

Sebuah penelitian memperjelas bahwa pembelajar itu dibuat, bukan dilahirkan. Melalui penggunaan praktik yang disengaja dan strategi khusus untuk meningkatkan kemampuan belajar, setiap peserta didik dapat mengembangkan keahliannya lebih cepat dan lebih efektif. Singkatnya, kita semua bisa menjadi lebih baik lagi. Ini menjadi satu penunjuk, bagaimana strategi belajar bisa lebih penting daripada kecerdasan bawaan.

Temuan penelitian menunjukkan, orang-orang yang dengan cermat melacak pemikiran mereka dengan cara belajar yang tepat, akan mengungguli orang lain yang memiliki tingkat IQ yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengembangan penguasaan, fokus pada bagaimana kita memahami adalah lebih penting daripada kecerdasan bawaan.

Beberapa penelitian, misalnya, secara konsisten menunjukkan bahwa orang-orang dengan tujuan yang jelas mengungguli orang-orang dengan tujuan yang tidak jelas. Dengan memiliki tujuan yang jelas (*target*), maka kita dapat mengelola motivasi lebih mudah dan mencapai kemajuan dengan pembelajaran yang lebih efektif. Psikolog juga mendefinisikan metakognisi adalah tentang menjadi lebih memahami apa yang kita ketahui. Ketika seorang spesialis berusaha mengatasi suatu masalah, mereka akan sering berpikir tentang bagaimana masalah itu dibingkai. Mereka acap mengevaluasi dan menanyakan ulang, apakah jawaban atau solusi yang mereka pikirkan masuk akal atau tidak. Mereka tidak berhenti bertanya pada diri sendiri apakah mereka benar-benar mendapatkan keterampilan atau konsep. Singkatnya, belajar adalah bagaimana mendapat manfaat dari refleksi. Belajar adalah perilaku yang bisa dipelajari. Menjadi pembelajar yang cepat bukan berarti kita menjadi siswa terpintar di kelas. Dengan siswa terpintar di kelas. Dengan memiliki tujuan yang jelas, dan merefleksikan pembelajaran pada saat yang tepat, peserta didik dapat menjadi pembelajar yang lebih baik.

Pemerintah bersama dunia usaha/industri dan pelaku pendidikan perlu mengembangkan sistem pembelajaran seumur hidup. Peserta didik juga harus ditanamkan pentingnya pembelajaran seumur hidup, yang didukung ketersediaan

materi belajar, fasilitas, dan informasi memadai berkaitan dengan peningkatan keterampilan yang mudah diakses semua kalangan masyarakat baik melalui dalam jaringan maupun luar jaringan. Penyediaan infrastruktur untuk pembelajaran seumur hidup ini menjadi penting untuk disediakan. Pemerintah perlu memberikan insentif kepada dunia usaha/industri yang memberikan pelatihan secara berkesinambungan, baik untuk karyawannya, maupun bagi para peserta didik calon tenaga kerja. Dengan begitu, semua pihak dapat merespon dinamika revolusi industri dengan menyiapkan tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri yang terus maju.

**PEMBAHASAN**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung masih relatif rendah di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dari lima indikator IPM tersebut, sektor pendidikan berkontribusi signifikan terhadap rendahnya IPM Provinsi Lampung. Berbagai upaya pemerintah daerah dalam bentuk program dan kegiatan untuk meningkatkan indeks pendidikan belum memberikan hasil yang optimal. Beberapa kabupaten teridentifikasi masih jauh tertinggal dalam pembangunan sektor pendidikan ini, sehingga secara akumulatif berpengaruh terhadap IPM provinsi.

Pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah daerah dengan kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan salah satunya dicerminkan dalam capaian IPM. Data IPM Provinsi Lampung menurut kabupaten dan kota dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah. Pemerintah daerah harus memiliki peta jalan dalam pembangunan sektor pendidikan ini. Arahnya harus jelas, juga dalam upaya pemerataan kualitas.

**Tabel 1.** Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2012-2017

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Lampung Barat	2,51	3,21	3,54	4,54	5,45
Tanggamanus	1,14	1,89	2,67	3,66	4,41	4,94	
Lampung Selatan	2,68	3,35	3,75	5,22	6,19	6,95	
Lampung Timur	5,10	6,07	6,42	7,10	7,88	8,05	
Lampung Tengah	5,60	6,57	7,07	7,61	8,33	8,95	
Lampung Utara	2,93	4,00	4,89	5,20	5,95	6,58	
Way Kanan	2,79	3,92	4,32	5,18	5,74	5,97	
Tulangbawang	4,11	4,91	5,83	6,08	6,74	7,07	
Pesawaran	9,98	0,94	1,70	2,70	3,47	4,43	
Pringsewu	5,37	6,14	6,58	7,55	8,26	8,61	
Meuji	7,67	8,16	8,71	9,79	0,72	1,87	
Tulangbawang Barat	0,77	1,46	2,46	3,01	3,77	4,58	
Pesisir Barat	-	8,95	9,76	0,55	1,50	2,20	
Bandar Lampung	2,88	3,93	4,34	4,81	5,34	5,98	

5	Met ro	2,8 6	4,2 7	4,9 8	5,1 0	5,4 5	5,8 7
	LA MPUN G	4,8 7	5,7 3	6,4 2	6,9 5	7,6 5	8,2 5

Sumber: BPS, 2018

Sektor pendidikan masih menjadi permasalahan krusial di Indonesia, di tengah prioritas pembangunan lainnya yang juga terus digesa oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti sektor infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Persoalan kemiskinan di Provinsi Lampung juga masih cukup tinggi, yang ditengarai salah satu akar utamanya rendahnya akses dan mutu pendidikan. Kemiskinan berkorelasi dengan rendahnya tingkat (juga mutu) pendidikan. Hanya beberapa kabupaten dan kota di Lampung yang memiliki indeks pendidikan yang relatif baik, seperti Kota Metro, Bandar Lampung, dan Kabupaten Pringsewu. Disparitas mutu dan pelayanan pendidikan di Provinsi Lampung juga masih cukup tinggi.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan PKLK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi menjadi persoalan baru yang membutuhkan penyikapan yang tepat dari semua pihak. Sementara pendidikan dasar tetap dikelola pemerintah kabupaten/kota, pengelolaan pendidikan menengah kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemisahan kewenangan ini tentu sudah didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya agar pemerintah daerah lebih fokus. Pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pendidikan masyarakat. Sedangkan pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan kebijakan pengelolaan pendidikan menengah. Sementara,

pendidikan memerlukan ketersambungan; khususnya antara pendidikan dasar dan menengah. Dalam implementasinya, pemisahan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah ini tentu diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tata kelola maupun kualitas hasil pendidikan itu sendiri.

Kekhawatiran pemisahan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah tersebut bukan tanpa alasan. Problem rentang kendali pemerintah provinsi dalam mengelola pendidikan menengah dan PKLK yang tersebar di kabupaten dan kota, dikhawatirkan menimbulkan ketidakefektifan dalam merespon permasalahan yang muncul. Seperti masalah pengelolaan kawasan hutan. Banyak hutan yang notabene berada di kabupaten, mengalami pengrusakan dan penggundulan, yang menimbulkan ancaman banjir. Namun, pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi kerusakan hutan tersebut, karena kewenangan ada pada pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten tidak memiliki unit kerja yang mengurus urusan kehutanan.

Dalam bidang pendidikan potensi masalah semacam ini sangat mungkin terjadi. Sekolah menengah (SMA, SMK, PKLK) yang notabene berada di wilayah kabupaten dan kota yang tersebar di provinsi, ada dalam satu kewenangan provinsi. Padahal kebutuhan penyelenggaraan pendidikan menengah secara eksisting juga menyangkut kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Seperti penyediaan infrastruktur penunjang penyelenggaraan pendidikan, akses transportasi, dan lainnya.

Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan di daerah juga ditengarai salah satu penyebabnya adalah masalah aksesibilitas. Selain masalah ekonomi. Jarak sekolah yang jauh dari rumah

tangga, kondisi jalan yang buruk, transportasi yang sulit juga masih menjadi persoalan yang mudah ditemui di pelosok kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung, yang menjadi salah satu hambatan masyarakat untuk mengakses pendidikan.

Dengan kondisi tersebut, sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi penting dibangun dalam rangka menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga. Meski kewenangan pengelolaan pendidikan berbeda, tetapi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi perlu bersinergi untuk membangun layanan pendidikan yang baik. Bentuk sinergi tersebut, antara lain, kebijakan strategis pemerintah provinsi harus mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten/kota; sebaliknya, kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten/kota harus mendapat support dari pemerintah provinsi. Juga, kebijakan bidang pendidikan—baik dasar maupun menengah—harus disinergikan antara kabupaten/kota dan provinsi. Budaya mutu perlu dikembangkan bersama.

Pendidikan dasar menentukan kualitas lulusannya yang akan melanjutkan ke pendidikan menengah. Partisipasi pendidikan dan kualitas lulusan pendidikan dasar yang rendah secara langsung akan berpengaruh terhadap peserta pendidikan menengah. Begitu juga selanjutnya, lulusan pendidikan menengah akan berpengaruh pada kualitas lulusan yang diserap di perguruan tinggi. Kompetensi dan daya saing saat ini sudah menjadi tuntutan persaingan yang tidak bisa dihindari. Pada jenjang perguruan tinggi, pendidikan sudah diarahkan pada kualitas. Bukan lagi aksesibilitas. Artinya, pengelolaan pendidikan dasar dan menengah juga harus diselaraskan dengan tuntutan tersebut. Pemerintah

kabupaten/kota dan provinsi seyogianya memiliki arah kebijakan yang selaras terkait pembangunan sektor pendidikan, termasuk faktor-faktor penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan.

Pembagian kewenangan antarjenjang pemerintahan hendaknya tidak diartikan sebagai pemisahan atau segregatif. Pemerintah kabupaten/kota yang selama ini memang sudah melakukan fungsi mengelola pendidikan menengah (SMA, SMK), perlu dilibatkan oleh pemerintah provinsi sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terbangun. Sinergi yang lebih baik justru perlu dibangun antara provinsi dengan kabupaten/kota, dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan menengah. Karena tantangan persaingan terus berkembang, teknologi semakin canggih, otomatisasi semakin meluas, maka pemerintah seyogianya bisa meningkatkan relevansi penyelenggaraan pendidikan dengan tantangan tersebut. Kurikulum pendidikan yang diterapkan harus bisa merespon dinamika dan memenuhi tuntutan keterampilan bagi lulusannya. Kondisi eksisting sekarang tampaknya sistem pendidikan menengah kita belum sejalan dengan tantangan dan tuntutan global.

Saat ini kita masih menghadapi persoalan mutu pendidikan. Akreditasi kita masih belum baik. Bahkan banyak sekolah belum terakreditasi. Manajemen pendidikan kita belum memiliki arah yang jelas. Bagaimana meningkatkan kompetensi guru, menjadikan kepala sekolah yang profesional bukan sekadar menjadi “pelaksana” kepala dinas di sekolah. Guru dan kepala sekolah ini menjadi determinan dari mutu sekolah. Secara umum karir dan kapasitas guru tidak terurus dengan baik. Pemberian tunjangan sertifikasi *an sich* bagi para guru tidak signifikan mendongkrak kualitas dan

profesionalismenya. Padahal corak dan mutu sekolah sangat tergantung kepala sekolah dan guru pendidiknya. SMK mengalami krisis guru produktif. Terutama untuk kelompok teknologi industri, permesinan, otomotif, elektronika, juga bangunan. Banyak SMK yang terpaksa memeckerjakan guru yang tidak sesuai dengan kompetensi jurusannya.

Akses pendidikan juga masih harus ditingkatkan, mengingat angka partisipasi kasar (APK) kita yang belum tinggi. Termasuk juga sumber-sumber belajar yang masih monoton belum berkembang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Pengelolaan pendidikan dan sekolah belum sepenuhnya berbasis data. Manajemen personalia bidang pendidikan juga belum berbasis data. Padahal sekarang sudah era multiliterasi dan *big data*. Rendahnya APK ini sebenarnya bisa diatasi, salah satunya, dengan memafaatkan kemajuan teknologi untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (*open distance learning*), dengan pembelajaran berbasis IT. Namun, problem keterbatasan infrastruktur dan jaringan yang dibutuhkan belum juga bisa teratasi dengan baik. Penyediaan dan pemanfaatan jaringan IT ini jika dilakukan secara tepat dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan pendidikan. Koordinasi dapat dilakukan menggunakan IT. Juga, pemanfaatannya untuk proses pembelajaran.

Problem keterbatasan infrastruktur juga masih dihadapi dunia pendidikan kita. Kebijakan zonasi menghadapi tantangan disparitas mutu yang cukup tajam antarwilayah. Ini bukan hanya persoalan satu pemerintah daerah, melainkan persoalan bersama. Disparitas mutu yang belum diatasi ini berpotensi mengganggu kebijakan zonasi.

Kurikulum muatan lokal juga belum mampu diramu dan diimplementasikan

dengan baik sesuai kondisi masyarakat daerah yang majemuk. Budaya daerah dan kearifan lokal belum tertransformasi dengan efektif dalam sistem pendidikan karakter kita. Bahkan, di perpustakaan kita tidak ada buku yang menjelaskan budaya Lampung secara komprehensif. Ketahanan budaya daerah menjadi tidak terjaga. Penguatan pendidikan karakter ini tidak bisa efektif dengan kebijakan yang terpisah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pendidikan karakter harus berkesinambungan dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi perlu disinkronkan dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Mengingat, sekolah, murid, juga guru secara eksisting berasal atau tinggal di kabupaten/kota setempat. Penyediaan infrastruktur pendukung juga sebagian menjadi kewenangan kabupaten/kota. Karena itu, koordinasi dan sinergi penting dibangun antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam memajukan sektor pendidikan.

Pemerintah daerah—provinsi, kabupaten, dan kota—perlu merencanakan pembangunan sektor pendidikan ini secara komprehensif. Jangan karena batasan kewenangan, pembangunan sektor pendidikan justru parsial dan sporadis. Ini berlaku baik dalam pengelolaan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, maupun pengelolaan pendidikan menengah oleh provinsi.

Perlu dipertimbangkan adanya ruang atau wadah bagi pemerintah kabupaten/kota untuk berkontribusi dalam pengelolaan pendidikan menengah (SMA, SMK, PKLK). Alternatifnya, bisa dalam bentuk pelibatan unsur kabupaten/kota dalam suatu lembaga baru yang berfungsi menjembatani peran provinsi dan

kabupaten/kota, atau perluasan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan. Sinergi tugas, fungsi, dan kewenangan ini harus dibangun dengan asas persamaan hak dan kewajiban, kesetaraan, dan kolaboratif. Lembaga intermediasi ini sekaligus berfungsi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan baik dari LPMP maupun BAN SM terkait pencapaian 8 SNP harus ditindaklanjuti secara efektif oleh pengambil kebijakan.

Kolaborasi provinsi dengan kabupaten/kota bisa dilakukan dalam pengembangan pendidikan karakter siswa dengan muatan lokal. Kurikulumnya harus terintegrasi antara pendidikan dasar dan menengah. Ini bisa menjadi garapan bersama kabupaten/kota dan provinsi. Pengelolaan guru juga bisa dikerjasamakan provinsi dengan lembaga terkait, termasuk dalam peningkatan karier dan kompetensi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Pemisahan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah tidak berarti diskoneksi penyelenggaraan antarjenjang pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sesuai prinsip penyelenggaraan pendidikan, bahwa pendidikan harus diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pemisahan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dimaknai sebagai upaya optimalisasi pengelolaan setiap jenjang pendidikan, dengan tetap menjaga keterpaduan dan sinergi dalam membangun mutu sekolah di daerah. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota

perlu membangun persepsi yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, sehingga kebijakan yang dibuat sinergis dan terintegrasi.

Diperlukan wadah (lembaga) koordinasi, integrasi, dan akselerasi peningkatan serta pemerataan mutu pendidikan di Provinsi Lampung, yang merepresentasikan otoritas pengambil kebijakan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Melalui wadah ini, pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Lampung diharapkan lebih terarah, sesuai dengan tuntutan global dan atau kebutuhan pengelolaan sumber daya lokal. Pelibatan dan peran aktif para pemangku kepentingan pendidikan (masyarakat) juga dapat dilakukan melalui wadah ini.

Peningkatan kompetensi guru perlu menjadi perhatian (prioritas) utama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya peningkatan serta pemerataan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Lampung. Kompetensi guru termasuk kemampuan dan penguasaan *soft skill* yang dibutuhkan peserta didik.

Pembangunan sektor pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Infrastruktur penunjang juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, seperti dukungan infrastruktur jalan dan transportasi yang baik dan pelayanan kesehatan yang merata. Peningkatan kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan mutu pelayanan kesehatan dan kecukupan gizi khususnya bagi ibu dan anak.

Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota perlu mengembangkan model pembelajaran khusus, yang ditujukan bagi peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sesuai Undang-Undang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

## 2. Saran

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat secara bersama-sama menginisiasi pembentukan Majelis Pertimbangan Pendidikan Provinsi Lampung (atau sebutan lain) sebagai wahana bagi pemerintah provinsi-kabupaten-kota untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Fungsi koordinasi, integrasi, akselerasi, dan pemerataan mutu pendidikan dapat dikembangkan melalui wadah ini.

Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota perlu memprioritaskan program peningkatan kompetensi guru dan penguasaan *soft skill* seperti kemampuan *critical thinking, communication skill, collaboration skill, creativity, dan problem solving*. Di samping itu, pemerintah provinsi, kabupaten, kota perlu memberikan perhatian terhadap peningkatan infrastruktur penunjang pendidikan, seperti jalan/transportasi yang terhubung dengan sekolah dan infrastruktur dasar pelayanan kesehatan.

Perlu pendataan dan penyediaan sarana-prasarana pendidikan khusus bagi warga yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk difasilitasi dan dikembangkan, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Cetakan VI, September 2010 (Revisi), Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya. Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Doni Muhandiansyah dkk, 1997, Inovasi Dalam Sistem Pendidikan; Potret Praktik Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jakarta.
- Hadi Aspirin dkk, 2015, Karakter Pendidikan Lampung; Opini Kritis Pakar, Praktisi, dan Pengamat tentang Pendidikan di Lampung. Penerbit Laras Bahasa, Bandar Lampung.
- Michael Moran, Martin Rein, Robert E. Goodin. 2015. Handbook of Public Policy, terjemahan oleh Imam Baehaqie. Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Rusman, Dr., M.Pd., Edisi Kedua 2012, Model-Model Pembelajaran; Mengembangkan Profesionalisme Guru, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sedarmayanti, Prof. Dr. Hj., M.Pd. APU. Cetakan Kedua Oktober 2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan; Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik. Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Stephen R. Covey. 2011. The 3rd Alternative. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Vincent Gaspersz. 2006. Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balance Scorecard Dengan Six Sigma; Untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintahan. Penerbit Gramedia, Jakarta.